

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Simon Patar Rizki Manalu¹, Hilman Lubis², Oki Prayogi³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tjut Nyak Dhien, Program Studi Ekonomi Pembangunan

Email: simonpatarrizkymanalu@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the influence of local taxes and local levies on regional income and economic growth. This type of research is associative in nature, employing the technique of multiple linear regression analysis for data analysis. The results of this study indicate that local taxes do not have a partial effect on regional income; local levies do not have a partial effect on regional income; local taxes do not have a partial effect on economic growth; local levies do not have a partial effect on economic growth. Furthermore, both local taxes and local levies do not have a simultaneous effect on regional income; both local taxes and local levies do not have a simultaneous effect on economic growth. It can be concluded that this study highlights that in the observed situation, the contributions of local taxes and local levies to both variables cannot be considered as primary factors. However, further analysis is needed to comprehend the context and other variables that might affect the relationship between local taxes, local levies, regional income, and economic growth.

Keywords: *Local Taxes, Local Retribution, Local Own Revenue, Economic Growth*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah; retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah; pajak daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi; retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi; pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah; pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menyoroti bahwa dalam situasi yang diamati, kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kedua variabel tersebut tidak dapat dianggap sebagai faktor utama, Namun diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami konteks dan variabel lain yang mungkin memengaruhi hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

1. Pendahuluan

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering disebut sebagai upaya pembangunan. Singkatnya, pembangunan adalah serangkaian upaya yang selalu ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang belum begitu baik, atau meningkatkan kehidupan masyarakat yang sudah cukup baik untuk menjadikannya lebih baik. Jadi hakekat pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dengan kata lain, pembangunan di Indonesia adalah tentang meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia, agar seluruh rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Namun, dalam perjalanannya,

pembangunan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks dan multidimensi. Bagi Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi dengan kondisi geografis dan potensi sumber daya yang berbeda-beda, pembangunan bukanlah hal yang mudah. Namun demikian, upaya untuk mengatasi tantangan pembangunan terus berlanjut. Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan kebijakan untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan secara menyeluruh.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah diberlakukanlah kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan kebijakan dimana pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada daerah untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan kepentingan daerah yang bersangkutan. Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini secara resmi diterapkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001, tepatnya di era reformasi. Dan kebijakan ini ditujukan agar daerah lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dasar dari kebijakan ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kota Medan agar Kota Medan dapat secara mandiri melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan masyarakatnya melalui pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013-2021 (Milyar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan
2013	1206.17
2014	1384.25
2015	1490.03
2016	1535.44
2017	1738.08
2018	1636.20
2019	1829.33
2020	1509.83
2021	1906.51

Sumber: BPS Kota Medan, Tahun 2013-2021

Dari tahun 2013 hingga 2021, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan berfluktuasi, dan dari tahun 2013 hingga 2017, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan meningkat. Tahun 2018, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan mengalami penurunan. Tahun 2019, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan mengalami peningkatan. Tahun 2020, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan mengalami penurunan dan pada tahun 2021, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan mengalami peningkatan.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan perlu didukung dengan perekonomian yang terus bertumbuh.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan, Tahun 2013-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2013	5.34
2014	6.08
2015	5.73
2016	6.27
2017	5.84
2018	5.88
2019	5.98
2020	-2.04
2021	2.61

Sumber: BPS Kota Medan, Tahun 2013-2021

Kenyataannya dari tahun 2013 hingga 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami tren yang menurun dan berfluktuasi. Pada tahun 2013 hingga 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami penurunan. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Medan mengalami penurunan. Dari tahun 2018 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Medan kembali meningkat. Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Medan kembali menurun. Dan pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Medan kembali meningkat.

Dan pertumbuhan ekonomi Kota Medan yang berfluktuatif dari tahun 2013 hingga 2021 tidak lepas dari peran pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), karena turut andil dalam meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3. Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Medan Tahun 2013-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan
2013	881.35
2014	962.73
2015	1000.21
2016	1125.49
2017	1368.85
2018	1312.10
2019	1477.33
2020	1195.85
2021	1495.75

Sumber: BPS Kota Medan Tahun 2013-2021

Dari tahun 2013 hingga 2021, pajak daerah di Kota Medan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 hingga 2017, pajak daerah di Kota Medan meningkat. Pada tahun 2018, pajak daerah di Medan menurun. Pada tahun 2019, penerimaan pajak daerah Kota Medan meningkat. Pada tahun 2020, penerimaan pajak daerah Medan menurun dan pada tahun 2021, pajak daerah Medan meningkat kembali.

Retribusi daerah, yang juga dikenal sebagai pungutan atau retribusi, adalah pembayaran dari perseorangan atau badan untuk layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (Pasal 1 angka 64 UU No. 28 Tahun 2009).

Tabel 4. Penerimaan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun 2013-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	Penerimaan Retribusi Daerah Kota Medan
2013	188.46
2014	177.01
2015	200.17
2016	115.60
2017	115.25
2018	85.20
2019	90.43
2020	89.70
2021	123.66

Sumber: BPS Kota Medan Tahun 2013-2021

Selama tahun 2013 hingga 2021, retribusi daerah di kota Medan berfluktuasi, dimana pada tahun 2013 hingga tahun 2014 retribusi daerah di Kota Medan mengalami penurunan. Pada tahun 2015 retribusi daerah di Kota Medan mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 retribusi daerah di Kota Medan mengalami penurunan. Dan pada tahun 2021 retribusi daerah di Kota Medan kembali mengalami peningkatan.

Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi di Kota Medan selama tahun 2013-2021.

2. Landasan Teoritis

A. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang wajib dibayarkan penduduk atau badan ke daerah sesuai undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk. Dan pajak kota diklasifikasikan sebagai berikut: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan atas penyediaan dan pemberian jasa atau izin tertentu. Anggoro (2017:249) mengklasifikasikan retribusi daerah ke dalam tiga kategori, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan wilayah yang berasal dari: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

D. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator dalam menganalisis tingkat progres perekonomian wilayah.

Sjafrizal (2017:156) menyatakan:

Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah pertumbuhan riil aktivitas produktif (tidak termasuk kenaikan harga) selama periode waktu tertentu, dan mencakup pertumbuhan barang dan jasa. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah:

$$\text{Laju Pertumbuhan} = \frac{PDRB(t) - PDRB(t-1)}{PDRB(t)} \times 100 \%$$

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Lokasi penelitian ini adalah kota Medan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Kota Medan. Data yang dikumpulkan adalah data time series selama sembilan tahun terakhir, mulai dari tahun 2013-2021. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda sebagai teknik analisis data, yang dapat diuji pada tingkat signifikansi 5%. Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah (Y1) dan pertumbuhan ekonomi (Y2). Alat analisis yang digunakan dalam teknik analisis regresi berganda adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang didukung oleh perangkat lunak SPSS 19.

Regresi memiliki bentuk persamaan sebagai berikut:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 PJD + \beta_2 RTD + \varepsilon$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PJD = Pajak Daerah

RTD = Retribusi Daerah

β_0 = Nilai Konstanta

β_1, β_2 = Nilai Koefisien Regresi

ε = *Error Term*

$$PE = \beta_0 + \beta_1 PJD + \beta_2 RTD + \varepsilon$$

Keterangan :

PE = Pertumbuhan ekonomi

PJD = Pajak Daerah

RTD = Retribusi Daerah

β_0 = Nilai Konstanta

β_1, β_2 = Nilai Koefisien Regresi

ε = *Error Term*

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

a) Uji Normalitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.58834633
Most Extreme Differences	Absolute	.227
	Positive	.227
	Negative	-.136
Kolmogorov-Smirnov Z		.680
Asymp. Sig. (2-tailed)		.744

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel hasil SPSS, nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* $0.744 > 0.05$ hal ini berarti data terdistribusi secara normal.

b) Uji Normalitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.51864650
Most Extreme Differences	Absolute	.223
	Positive	.136
	Negative	-.223
Kolmogorov-Smirnov Z		.669
Asymp. Sig. (2-tailed)		.761

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel hasil SPSS, diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* $0.761 > 0,05$,hal ini berarti data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

a) Uji Multikolinearitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.351	1.980		2.702	.035		
Pajak Daerah	.009	.031	.118	.297	.777	.896	1.116
Retribusi Daerah	-.025	.030	-.337	-.850	.428	.896	1.116

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari tabel *output Coefficients* pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui bahwa *nilai Tolerance* untuk variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) adalah $0.896 \geq 0.10$. Sementara, *nilai VIF* untuk variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) adalah $1.116 \leq 10.00$. Artinya, tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi.

b) Uji Multikolinearitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.351	1.980		2.702	.035		
Pajak Daerah	.009	.031	.118	.297	.777	.896	1.116
Retribusi Daerah	-.025	.030	-.337	-.850	.428	.896	1.116

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel keluaran *Coefficients* pada bagian *Collinearity Statistics* diketahui *nilai Tolerance* untuk variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) adalah $0.896 \geq 0.10$. Sementara, *nilai VIF* untuk variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) adalah $1.116 \leq 10.00$. Artinya, tidak ada masalah multikolinearitas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

a) Uji Heterokedastisitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.751	.508		3.444	.014
Pajak Daerah	-.006	.008	-.321	-.795	.457
Retribusi Daerah	-.005	.008	-.282	-.698	.511

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel pajak daerah (X1) sebesar 0.457. Sedangkan nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel retribusi daerah (X2) sebesar 0.511. Karena nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih tinggi dari 0.05, maka kesimpulannya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

b) Uji Heterokedastisitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.031	.728		1.417	.206
	Pajak Daerah	-.014	.011	-.293	-1.194	.278
	Retribusi Daerah	.030	.011	.680	2.768	.033

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel pajak daerah (X1) adalah sebesar 0.278. Dan nilai signifikansi (Sig.) retribusi daerah (X2) adalah sebesar 0.033. Karena nilai signifikansi (Sig.) X1 melebihi 0.05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Dan karena nilai signifikansi (Sig.) X2 dibawah 0.05 maka dapat disimpulkan terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus seperti ini, untuk membuktikan model regresi terbebas dari heterokedastisitas maka perlu dilakukan *uji rank spearman* sebagai berikut:

Correlations

			Abs_Res	Retribusi Daerah
Spearman's rho	Abs_Res	Correlation Coefficient	1.000	.550
		Sig. (2-tailed)	.	.125
		N	9	9
	Retribusi Daerah	Correlation Coefficient	.550	1.000
		Sig. (2-tailed)	.125	.
		N	9	9

Berdasarkan hasil uji rank spearman diatas diketahui bahwa nilai t hitung dari variabel retribusi daerah (X2) = 1.742 dengan nilai t tabelnya = 2.447. Berdasarkan kriteria pengujian dari

uji rank spearman diperoleh hasil $-2.447 \leq 1.742 \leq 2.447$, disisi lain, berdasarkan kriteria pengujian dari *uji rank spearman* diperoleh hasil nilai signifikansi dari variabel retribusi daerah (X_2) = 0.125 ≥ 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam model regresi.

4. Uji Autokorelasi

a) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.695 ^a	.482	.310	1.83407	2.427

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel *output Model Summary^b* diatas diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 2.427. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai *Durbin-Watson* pada taraf signifikansi 5 % dengan rumus (k;N). Adapun jumlah variabel independen (k) = 2, sementara jumlah sampel (N) =9. Berdasarkan tabel nilai kritis *Durbin-Watson* ditemukan nilai dL sebesar 0.6972 dan nilai dU sebesar 1.6993. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai 4-dU (2.3007) < nilai DW (2.427) < nilai 4-dL (3.3028). Artinya, tidak ada kesimpulan yang pasti sehingga perlu dilakukan uji *run test*.

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.16933
Cases < Test Value	4
Cases >= Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	6
Z	.040
Asymp. Sig. (2-tailed)	.968

a. Median

Berdasarkan hasil uji *run test* di atas, diketahui bahwa nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* sebesar 0.968 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi.

b) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.391 ^a	.153	-.129	2.90828	1.497

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel hasil *Model Summary^b* diatas, nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.497. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai *Durbin-Watson* pada taraf signifikansi 5 % dengan menggunakan rumus $(k;N)$. Jumlah variabel independen $(k) = 2$, sedangkan jumlah sampel $(N) = 9$. Berdasarkan tabel nilai kritis *Durbin-Watson* ditemukan nilai dL sebesar 0.6972 dan nilai dU sebesar 1.6993. Oleh karena itu dapat disimpulkan nilai $dL (0.6972) < \text{nilai DW} (1.497) < \text{nilai } dU (1.6993)$. Artinya, tidak ada kesimpulan yang pasti sehingga perlu dilakukan uji *run test*.

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.65345
Cases < Test Value	4
Cases \geq Test Value	5
Total Cases	9
Number of Runs	3
Z	-1.406
Asymp. Sig. (2-tailed)	.160

a. Median

Berdasarkan hasil uji *run test* diketahui bahwa nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* $0,160 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dengan demikian, masalah autokorelasi yang tidak dapat diselesaikan dengan uji Durbin-Watson dapat diselesaikan dengan uji *run test*, sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

B. Analisis Regresi Linear Berganda

1) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	17.203	1.249		13.775	.000
	Pajak Daerah	-.044	.020	-.700	-2.257	.065
	Retribusi Daerah	-.001	.019	-.018	-.059	.955

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan tabel output koefisien analisis regresi linier berganda di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PAD = 17,203 - 0,044 PJD - 0,001 RTD + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi yang diperoleh diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Konstanta (β_0) bernilai positif sebesar 17.203. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) bernilai nol, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 17.203 satuan atau 172.03 %.
- b) Koefisien regresi untuk variabel pajak daerah (X1) bernilai negatif sebesar -0,044. Hal ini berarti bahwa kenaikan satu satuan pada variabel pajak daerah, dengan asumsi bahwa variabel independen lain nilainya tetap, maka akan menyebabkan penurunan sebesar -0,044 satuan atau 4,4% pada variabel pendapatan asli daerah (PAD).
- c) Koefisien regresi untuk variabel retribusi daerah (X2) bertanda negatif sebesar -0,001. Hal ini berarti jika variabel retribusi daerah mengalami kenaikan satu satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap, maka variabel pendapatan asli daerah (Y1) justru akan mengalami penurunan sebesar -0,001 satuan atau 0,01%.

2) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.351	1.980		2.702	.035
Pajak Daerah	.009	.031	.118	.297	.777
Retribusi Daerah	-.025	.030	-.337	-.850	.428

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel output koefisien analisis regresi linear berganda diatas,diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$PE = 5.351 + 0.009 PJD - 0.025 RTD + \varepsilon$$

Hasil persamaan regresi yang diperoleh di interpretasikan sebagai berikut:

- a) Konstanta (β_0) bernilai positif dengan nilai sebesar 5,351. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel pajak daerah (X1) dan retribusi daerah (X2) bernilai nol, maka nilai pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebesar 5.351 satuan atau 55,31%.

- b) Nilai koefisien regresi variabel pajak daerah (X1) dengan arah positif yaitu sebesar 0,009. Hal ini berarti bahwa kenaikan satu satuan pada variabel pajak daerah (X1), dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan, maka akan menyebabkan kenaikan pada variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,009 satuan atau 0,9%.
- c) Nilai koefisien regresi pada variabel retribusi daerah (X2) dengan arah negatif sebesar -0,025. Hal ini berarti jika variabel retribusi daerah (X2) mengalami kenaikan satu satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap, maka variabel pertumbuhan ekonomi (Y2) akan mengalami penurunan sebesar -0,025 satuan atau 2,5%.

C. Uji Hipotesis

1. Koefisien Determinasi (R^2)

a) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695 ^a	.482	.310	1.83407

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Berdasarkan output *Model Summary*, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.310 atau 31 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 31 %, sedangkan sisanya 69 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

b) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.391 ^a	.153	-.129	2.90828

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Berdasarkan hasil *Model Summary*, nilai *Adjusted R Square* sebesar -0.129 atau 0 %. Nilai *Adjusted R Square* tersebut mengandung arti bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0 %. Hal ini dikarenakan dalam uji empiris,

nilai *Adjusted R Square* yang negatif dianggap nol, atau variabel independen sama sekali tidak dapat menjelaskan *varians* variabel dependen. Secara sistematis, jika nilai *R Square* = 1, maka *Adjusted R Square* = *R Square* = 1, dan jika nilai *R Square* = $(1 - k)/(n - k)$. Jika $k > 1$, maka *Adjusted R Square* akan bernilai negatif (Sena, 2011; Yusuf, 2019).

2. Uji t Parsial

a) Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD

Nilai t_{hitung} pajak daerah = -2.257. Dan untuk mengetahui t_{tabel} dalam taraf signifikansi 0.025 digunakanlah rumus derajat kebebasan residual (df) = $n - k - 1$. Dimana n (sampel) = 9 dan k (variabel independen) = 2. Berdasarkan rumus tersebut diketahui bahwa $df = 6$. Dan berdasarkan $df = 6$, maka diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 0.025 = 2.447. Karena nilai t_{hitung} pajak daerah $-2.257 < \text{nilai } t_{tabel} 2.447$ dan nilai signifikansi (*Sig.*) 0.065 > probabilitas 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya, pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sari & Miftahuljannah, 2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan hasil penelitian ini membantah hasil penelitian (Natoen et al., 2018; Nusa & Panggalo, 2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

b) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Nilai t_{hitung} retribusi daerah = - 0.059. Dan untuk mengetahui t_{tabel} dalam taraf signifikansi 0.025 digunakanlah rumus derajat kebebasan residual (df) = $n - k - 1$. Dimana n (sampel) = 9 dan k (variabel independen) = 2. Berdasarkan rumus derajat kebebasan residual (df) = 6. Dan berdasarkan $df = 6$, maka diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 0.025 = 2.447. Karena nilai t_{hitung} retribusi daerah $-0.059 < \text{nilai } t_{tabel} 2.447$ dengan nilai signifikansi (*Sig.*) 0.955 > probabilitas 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya, retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian (Listyowati & Rahmayati, 2023; Nariswari & Muchtolifah, 2022) yang menyatakan bahwa retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dan hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian (Damanik & Panjaitan, 2022; Kasih & Sulistyowati, 2022; Kusuma &

Wirawati, 2013) yang menyatakan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

c) Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai t_{hitung} pajak daerah = 0.297. Dan untuk mengetahui t_{tabel} dalam taraf signifikansi 0.025 digunakanlah rumus derajat kebebasan residual (df) = $n-k-1$. dimana n (sampel) = 9 dan k (variabel independen) = 2. Berdasarkan rumus derajat kebebasan residual (df) = 6. Dan berdasarkan $df = 6$, maka diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 0.025 = 2.447. Karena nilai t_{hitung} pajak daerah $0.297 < \text{nilai } t_{tabel} 2.447$ dengan nilai signifikansi (*Sig.*) $0.777 >$ probabilitas 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya, pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini membantah temuan (Miswar et al., 2021) yang menyatakan pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

d) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai t_{hitung} retribusi daerah = -0.850. Dan untuk mengetahui t_{tabel} dalam taraf signifikansi 0.025 digunakanlah rumus derajat kebebasan residual (df) = $n-k-1$. dimana n (sampel) = 9 dan k (variabel independen) = 2. Berdasarkan rumus derajat kebebasan residual (df) = 6. Dan berdasarkan $df = 6$, maka diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 0.025 = 2.447. Karena nilai t_{hitung} retribusi daerah $-0.850 < \text{nilai } t_{tabel} 2.447$ dengan nilai signifikansi (*Sig.*) 0.428 $>$ probabilitas 0.05 maka H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mina & Ratna, 2020) yang menyatakan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Uji F Simultan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.813	2	9.407	2.796	.139 ^a
	Residual	20.183	6	3.364		
	Total	38.996	8			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Hasil output Anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.139 dan nilai F_{hitung} sebesar 2.796. Untuk membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 0.05 digunakanlah rumus $df_1 : k-1$ atau $df_1 : 2-1 = 1$, dan $df_2 : n-k-1$ atau $df_2 = 9-4-1 = 6$. Dan berdasarkan output df_1 dan df_2 diketahui bahwa nilai $df_1 = 1$ dan nilai $df_2 = 6$, dan berdasarkan nilai df_1 dan df_2 tersebut diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 5.99. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dibuktikan dari nilai F_{hitung} sebesar $2.796 < \text{nilai } F_{tabel}$ sebesar 5.99 dan nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar $0.139 > 0.05$.

b) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.176	2	4.588	.542	.607 ^a
	Residual	50.749	6	8.458		
	Total	59.925	8			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Hasil output Anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.607 dan nilai F_{hitung} sebesar 0.542. Untuk membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} pada taraf signifikansi 0.05 digunakanlah rumus $df_1 : k-1$ atau $df_1 : 2-1 = 1$, dan $df_2 : n-k-1$ atau $df_2 = 9-4-1 = 6$. Dan berdasarkan output df_1 dan df_2 diketahui bahwa nilai $df_1 = 1$ dan nilai $df_2 = 6$, dan berdasarkan nilai df_1 dan df_2 tersebut diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 5.99. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) variabel independen (pajak daerah dan retribusi daerah) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan dari nilai F_{hitung} sebesar $0.542 < \text{nilai } F_{tabel}$ sebesar 5.99 dan nilai signifikansi (*Sig.*) sebesar $0.607 > 0.05$.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis pada penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan Tahun 2013-2021.
- b) Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan Tahun 2013-2021.
- c) Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021.
- d) Retribusi daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021.
- e) Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013-2021.
- f) Pajak Daerah dan retribusi daerah secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan Tahun 2013-2021.

5.2 Saran

- a) Pemerintah kota Medan perlu memberikan pembebasan pajak daerah terhadap pedagang kaki lima dan UMKM untuk merangsang pertumbuhan pedagang kaki lima dan UMKM; dan memperluas penarikan pajak daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap perusahaan yang padat modal.
- b) Pemerintah kota Medan harus memberikan pembebasan retribusi terhadap pedagang kaki lima dan UMKM untuk merangsang pertumbuhan pedagang kaki lima dan UMKM; mengurangi besaran retribusi terhadap rumah sangat sederhana, rumah sederhana, dan rumah sedang/menengah; dan menarik retribusi sesuai peraturan yang berlaku terhadap persampahan; dan parkir.
- c) Pemerintah Kota Medan harus memperluas cakupan penerimaan pajak daerah ke perusahaan-perusahaan yang bersifat padat modal untuk memastikan peningkatan penerimaan pajak daerah yang konsisten, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
- d) Pemerintah kota Medan perlu membebaskan retribusi terhadap pedagang kaki lima dan UMKM tetapi memperluas jangkauan dan meningkatkan cakupan retribusi terhadap

pengendalian lalu lintas; tempat rekreasi dan olahraga; pemakaian kekayaan daerah; tempat penginapan dan villa; pengelolaan limbah cair komersial dan industri; penjualan minuman beralkohol; bangunan yang berfungsi sebagai hunian mewah, usaha, khusus, dan ganda; dan konstruksi kolam renang atau konstruksi lainnya.

- e) Dalam rangka meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Medan perlu merevisi peraturan daerah dan peraturan walikota tentang pajak dan retribusi daerah, dan meningkatkan pelayanan publik serta memelihara fasilitas umum.

Daftar Pustaka

- Anggoro, D.D. (2017) . Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press
- Budi, T. S., Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2021). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 177–194. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16305>
- Damanik, D., & Panjaitan, P. D. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4697–4706.
- Fajrianti, N. A. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang Tahun 2014–2018. *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 5(2), 45–54. <https://doi.org/10.24967/ekombis.v5i2.686>
- Kasih, M. W. R., & Sulistyowati, E. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11869–11876. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.565>
- Kusuma, M. K. A., & Wirawati, N. G. P. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pad Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 5(3), 574–585.
- Listyowati, T. M., & Rahmayati, A. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tiwi. *Journal of Economic and Bussines Research*, 2(1), 68–81. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.vi>[sres.2014.07.001](http://dx.doi.org/10.1016/j.vi)<https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Mina, M., & Ratna. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Laba Badan Usaha Milik Daerah di (BUMD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 3(1), 39–50. <https://doi.org/10.29103/jeru.v3i1.3200>
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*

(*Jmas*), 2(3), 153–169.

- Nariswari, L. E., & Muchtolifah. (2022). Efektivitas Dan Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 7(1), 62–87. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v7i1.2374>
- Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7–15.
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145–158. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
- Sari, W. ., & Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-Jeornal Equilibrium Manajemen*, 5(2), 12–19.
- Sena, T. F. (2011). VARIABEL ANTISEDEN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB). *Jdm*, 2(1), 70–77. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>
- Sjafrizal.(2017). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Depok: Rajawali Pers.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Yusuf, M. (2019). PENGARUH BELANJA IKLAN, AUDIENCE SHARE, STRUKTUR MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertelevision Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007 – 2016). *Jurnal Indonesia Membangun*, 18(2), 59–71.